

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman. 30
- Al Qasim Abdurahman Abdul Aziz, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*(Riyadh: Jamiah Riyadh, 177),halaman. 83.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), halaman. 54
- Azd-dzikra Muhammad, *Menikah Dalam 27 Hari*, (Depok: Lingkar Pena Peristiwa, 2018, halaman. 136.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011). halaman. 44.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta:Pt Ikrar mandiri abadi, 2018)halaman.107.
- Budiarti, *Studi Siyâsah Syariyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam* ( UIN Alauddin Makassar) halaman. 56
- Departemen Agama RI, *Al-Quar'an dan terjemahannya*, (Semarang, CV. Toha Putra, 1989) halaman. 110.
- Djazuli A, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), halaman. 29.
- Ghozal Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) halaman. 17
- Hadi Sopian , “*Penghulu citra wawasan etika, Penghulu yang membaca dan menulis,*” (Edisi III Tahun III, Penghulu, Desember 2013), halaman. 34

- Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama- Agama*, (Jakarta: UKI Atmajaya, 2020), halaman. 17
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), halaman. 58.
- Jafar Wahyu Abdul, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *AL IMARAH* 3:1 (2018) 21-22.
- Jauziah Ibnul Qayyim Al, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar’iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005),halaman. 26.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017) halaman. 6
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cet 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), halaman. 11.
- Mohammad Asmawi, *Nikah (dalam Perbincangan Dan perbedaan)* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), halaman. 23.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.
- Musthofa Adib Basri, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Semarang:Cv Asy Syifa, 1992), halaman .745
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, halaman.64.
- Rofiq Ahmad, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), halaman. 51.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung;Pustaka Setia;2001), halaman. 200
- Sahrani Tahami, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali, 2010) ), halaman. 6

- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), halaman. 17
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020) halaman 93.
- Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), halaman. 14
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – undang Perkawinan* (Jaakarta: Kencana, 2009), halaman. 59.
- Syarif Mujar Ibnu, Khammi Zada, *Fiqh siyasah (doktrin dan pemikiran politik islam)*, (Erlangga, 2008), 2-9.
- Taimiyah Syekhul Islam Ibnu, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: *Maktabah al Muayyad*, 1993.), halaman. 125.
- Thalib Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), halaman. 26
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pers, 2020), halaman. 14.
- Tobroni, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), halaman. 61.
- Zuhaily Wahbah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Pratama,1997), halaman. 89

## **Jurnal**

- Fahmi Mutiara , “Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Alquran “  
Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol. 2 No. 1, (2017) halaman 35.
- Mudhiiah Ahmad Atabik dan Khoridatul, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam Vol 5 No. 2 (Desember 2019) halaman 287.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Adat* (Jurnal pemikiran dan penelitian social, volume 7. nomor 2 Desember 2016) 415.

Heti Yurda, “Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu)” Jurnal hukum islam dan peradilan Vol . 2 No. 1 (April 2017) halaman 42.

### Wibsite

<https://pa-ngamprah.go.id/berita-seputar-peradilan/188-pengaruh-uu-nomor-16-tahun-2019> Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19 : 45 WIB

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/#:~:text=Kerangka%20berpikir%20adalah%20suatu%20dasar,memakan%20konsep%2Dkonsep%20dari%20penelitian.> Diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 22 : 30 WIB

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5770911/tata-cara-pernikahan-secara-islam-berapa-usia-minimal>, diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 21.20 WIB

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/21/pengertian-biaya> , diakses pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 03.37 WIB

### Skripsi

Muh Arifin, “ Analisis Struktur Biaya Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,” ( *Skripsi*, fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), x.

Nurkholifah Enok Siti “ Analisis Kepuasan Publik Terhadap Biaya<sup>1</sup> Muhammad Faishol Abdau yang berjudul “Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pernikahan Dalam Tinjauan Siyasa Syariyyah (Kasus Di Kua Kecamatan Rajagaluh),” ( *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2018)

Saputra Muhammad Bilal, “Respon Masyarakat dan Penghulu KUA tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP 47 Tahun 2004”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

### **Tesis**

Sam’ani, “Problematika Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Pencatatan Nikah Di Kabupaten Barito Kuala” (*Tesis*, Pascasarjan UIN Antasari, 2018)

### **Perundang – undangan**

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor. 71 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal I.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019) 2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Lainnya**

Sumber: File KUA Kec.Mundu

Wawancara langsung dengan Staf administrasi KUA Kec. Mundu Amsor, pada hari kamis, 4 Mei 2023 Pukul 13.15 di kantor KUA Kec. Mundu Cirebon.

Wawancara langsung dengan pengulu KUA Kec. Mundu Deden Samsul H, S.HI, pada hari kamis, 4 Mei 2023 Pukul 13.40 di kantor KUA Kec. Mundu Cirebon

